

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. KESIMPULAN

1. Atlet pencak silat, sebagai warga negara sekaligus subjek hukum, memiliki kewajiban untuk menaati norma hukum positif dan tanggung jawab konstitusional, baik di dalam maupun di luar arena pertandingan. Tindakan yang melampaui batas kewajaran atau melanggar hukum dapat dikenai sanksi pidana, administratif, maupun etik, melalui mekanisme internal organisasi olahraga dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum, pembentukan unit etik, serta sinergi antar lembaga menjadi penting guna memastikan setiap atlet bertindak sesuai hukum, menjunjung sportivitas, dan menjaga martabat bangsa melalui perilaku yang disiplin dan bermoral.
2. Perlindungan hukum bagi atlet pencak silat dalam pertandingan merupakan bagian penting dari sistem keolahragaan nasional yang harus dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup regulasi yang jelas, kontrak kerja yang adil, edukasi hukum, asuransi, dan pengawasan dari lembaga terkait guna mencegah risiko yang membahayakan atlet. Sementara perlindungan represif melibatkan penegakan hukum pidana, gugatan perdata, serta sanksi administratif bagi pelanggar, disertai pendampingan hukum dan pemulihan bagi

korban. Untuk menjamin efektivitasnya, perlu sinkronisasi antar regulasi nasional dan organisasi olahraga, serta penyusunan regulasi khusus yang mengatur secara rinci perlindungan hukum bagi atlet, terutama dalam kasus cedera berat atau kematian, demi menciptakan keadilan dan menjunjung tinggi martabat atlet serta dunia olahraga.

#### 4.2. SARAN

1. Peningkatan Literasi Hukum dan Etika bagi Atlet Secara Terstruktur dan Berkelanjutan Atlet pencak silat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang norma hukum dan etika yang berlaku dalam dunia olahraga. Untuk itu, perlu diselenggarakan program pelatihan hukum dan etika secara rutin dan terstruktur, yang difasilitasi oleh IPSI, Kemenpora, maupun lembaga hukum seperti Komnas HAM atau LPSK. Materi yang disampaikan harus mencakup hukum pidana, etika pertandingan, hak asasi manusia, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran baik di dalam maupun di luar lapangan. Peningkatan literasi ini akan mendorong lahirnya atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan moral.
2. Penyusunan dan Penguatan Regulasi Khusus Perlindungan Atlet Pencak Silat Mengingat karakteristik pencak silat sebagai olahraga bela diri yang berisiko tinggi, pemerintah bersama lembaga legislatif perlu menyusun regulasi khusus dalam UU Keolahragaan yang mengatur secara rinci perlindungan hukum bagi atlet bela diri. Regulasi ini harus mencakup standar perlengkapan keselamatan,

kewajiban penyelenggara pertandingan, prosedur hukum jika terjadi cedera berat atau kematian, serta hak-hak korban dan keluarganya. Dengan regulasi yang tegas dan spesifik, maka kepastian hukum dan perlindungan bagi atlet pencak silat dapat terwujud secara menyeluruh dan adil. Perlu dipertimbangkan pembentukan *Dewan Perwakilan Atlet* yang berfungsi sebagai wadah resmi untuk menyuarakan kepentingan dan perlindungan hukum bagi atlet pencak silat. Dewan ini dapat berperan dalam memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi pertandingan, memastikan standar keselamatan diterapkan, serta menjadi penghubung antara atlet dengan federasi olahraga, penyelenggara, maupun pihak penegak hukum apabila terjadi kasus luka berat atau kematian. Dengan adanya perwakilan atlet, posisi dan hak atlet dalam sistem keolahragaan akan lebih terjamin, sehingga tercipta suasana pertandingan yang lebih aman, adil, dan menjunjung tinggi prinsip sportivitas.